BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK / SUBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Bank Islam di Indonesia

Inspirasi awal munculnya praktek perbankan islam di Indonesia tentu tidak dapat kita lepaskan dari pusat genggaman bunga dalam sistem prekonomian nasional dan juga perdebatannya secara umum. Pada organisasi muhammadyah polemik menyangkut isu hadirnya lembaga perbankan nir-riba di bicarakan pada Mu'tamar khusus di Sidoarjo pada tahun 1968 yang membahas salah satu diantaranya tentang hukum bank, putusan Majelis Tarjih tentang bank terdiri dari atas tiga bagian : pertimbangan atau konsideran, keputusan atau ketetapan dan penjelasan. Konsideran terdiri atas pertimbangan akademik, pertimbangan sosial dan pertimbangan dalil, Dalam sidang Majelis Tarjih Muhammadyah di Sidoarjo ditegaskan bahwa (N. Huda dan M. Heykal : 2010) :

a. Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah.
b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya adalah halal.
c. Bunga yang di berikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dikategorikan sebagai mutasyabihat (sesuatu yang meragukan).

d. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadyah untuk mengusahakan terwujudnya konsep sistem ekonomi terutama lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.

Ketegasan keputusan Majelis Tarjih tentang bunga bank, baru di tetapkan ketika Musyawarah Besar PP Muhammadyah yang diadakan Yogjakarta pada 27 Juni 2006, lebih jelasnya pada Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadyah dituangkan pada keputusan Nomor 8 Tahun 2006 yang memutuskan bahwa bunga bank adalah riba dan jelas keharamannya.

Sementara itu dari histori Nahdatul Ulama, masalah terkait riba dan bunga bank baru bisa disimpulkan melalui beberapa kali persidangan. Pada Muktamar Nahdatul Ulama ke-12 yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Maret 1937 ditetapkan bahwa hukum menempatkan uang di bank demi keamanan saja dan tidak yakin bahwa uangnya digunakan untuk larangan agama, adalah makruh. Adapaun hukum bank dan bunganya itu sendiri dipersamakan dengan gadai, ditetapkan pada Muktamar NU ke-2 yang di laksanakan di Surabaya pada tanggal 19 Oktober 1927. Pertanyaan yang hampir sama yaitu tentang bank dan bunganya diulas kembali dalam konfrensi besar syariah NU yang dilaksanakan pada Maret 1957 di Surabaya. Pada Munas alim ulama dan KONBES NU pada tahun 1982 di Bandar Lampung, pada tubuh NU masih terjadi silang pendapat dan belum ada satu kesempatan berkaitan dengan bunga bank (konteks : bank konvensional), tetapi MUNAS mengamanatkan berdirinya bank islam

dengan sistem tanpa bunga. Beberapa perbedaan pendapat itu dapat di redaksikan melalui fakta sebagai berikut (N. Huda dan M. Hheykal : 2010) :

a. Berkaitan dengan bank bunga bank konvensional. Ada pihak yang berpendapat bahwa bunga bank riba secara mutlak dan hukumnya haram. Ada pula pihak yang berpendapat bahwa bunga bank belum tentu sama dengan riba, sehingga hukumnya boleh
b. Berkaitan dengan dibedakanya bunga menjadi bunga konsumtif dan juga produktif. Bunga yang di kategorikan konsumtif adalah haram dan bunga yang di kategorikan produktif adalah halal. Adapun bunga yang di peroleh dari tabungan giro dan depositoadalah halal (Antonio,Syafii dalam N. Huda dan M. Heykal : 2010)

Setelah di keluarkannya Pakto 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendiri bank-bank perkreditan rakyat dengan bisnis sistem islam di beberapa daerah di Indonesia. Pertamakali yang mendapat ijin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991 serta BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh (Dewi dalam N. Huda dan M. Heykal : 2010). Pada akhirnya, permintaan yang ada dari sebagian kalangan masyarakat terkait antusias adanya bank berbasis tanpa bunga mendapatkan reaksi positif dari pemerintah pada tahun 1991. Respon baik tersebut di aktualisasikan dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia melalui akta

pendirian yang ditandatangani pada 1 November 1991. Melalui proses pengumpulan modal yang yang di lakukan oleh Presiden RI pada saat itu yakni (alm) Soeharto pada tanggal 3 November 1991 terkumpul dana komitmen modal disetor untuk PT Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp106.126.382.000. Dengan dasar alasan birokrasi ditambah dengan prosedur-prosedur legal yang harus di tempuh, maka pada tanggal 1 Mei 1992 BMI secara resmi mulai beroperasi di Indonesia.

2. Sejarah Perkembangan Perbankan Islam di Tanah Air Dalam Dimensi Legalitas Institusi

Rekam jejak berdirinya bank islam di Indonesia tentu memiliki interkoneksitas yang erat dengan kedudukan politik dan iklim birokratif yang ada di negara kita. Secara sistematis perkembangan perbankan islam dalam kacamata politik, yakni melalui intervensi Negara dalam menghadirkan legitimasi hukum (N. Huda dan M Heykal : 2010) :

a) 1974 : Berupa ide dalam seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah. Belum dapat di realisasikan secara utuh karena Undang-Undang (UU) yang belum memungkinkan untuk di deklarasikan dan adanya hambatan politis
b) 1988 : PAKTO 88. Kebujakan pemerintah untuk menyediakan akses liberalisasi perbankan Indonesia memberikan peluang baru. Belum ada dasar hukum, kecuali adanya klausal dalam PAKTO yang menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan bunga sebesar 0 persen.

c) 1990 : Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua,Bogor. Hasilnya adalah keputusan untuk membentuk kelompok kerja yang mendirikan bank islam di Tanah Air.

d) 1991 : 1 November, akta pendirian BMI di tandatangani. 3 November Presiden Soeharto membantu pengumpulan dana untuk pendirian BMI di istana Bogor

e) 1992 : 1 Mei, BMI mulai beroperasi. UU No 7 Tahun 1992 keluar dan mengakomodasi perbankan dengan konsep bagi hasil. Keluar pula Praturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

f) 1997-1998 : Indonesia dilanda krisis moneter terparah dalam sejarah. Banyak bank konvensional tumbang karena Capital Adequancy Ratio (CAR) negatif dan mengalami kerugian negatif spread.

g) 1998 : UU. No. 10 Tahun 1998 lahir. UU ini memberikan peluang bagi pengembangan perbankan islam. Dengan begitu dual banking system berlaku tanpa malu-malu lagi. Dengan adanya UU tersebut maka bank konvensional juga boleh membuka Unit Usaha Syariah (UUS)

h) 1999 : UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam UU ini disebutkan secara eksplisit bahwa BI bertanggungjawab terhadap pengawasan perbankan termasuk perbankan islam

i)2008 : UU. No. 21 Tahun 2008 disahkan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono sebagai legitimasi eksplisit terkait operasional perbankan syariah.

B. STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL

1) Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia

DPK Perbankan Syariah dalam penelitian ini meliputi total Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah yang dihimpun oleh BUS dan UUS, yang pertumbuhan DPK-nya ditunjukkan pada grafik berikut :

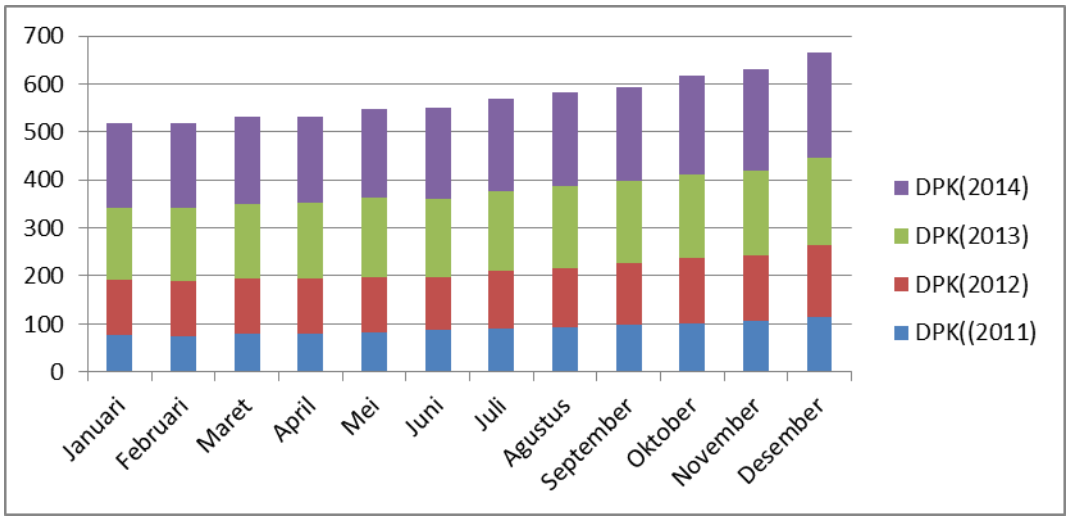

Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011:1-2014:12 (Miliar Rupiah)

Dari Gambar 4.1. tampak bahwa laju pertumbuhan Dana pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014 terus meningkat jumlahnya dari bulan Januari hingga bulan Desember, Akan tetapi peningkatannya relatif lambat dan beberapa kali mengalami konstan dan menurun. Adapun laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 yang mengalami konstan yaitu pada

bulan Januari dan Februari. Kemudian laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan April mulai menurun, meski pada bulan Mei hingga Desember kembali naik dan meningkat terus. Kemudian pada tahun 2012 laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung meningkat meski beberapa kali mengalami penurunan. Pada bulan Januari hingga april kondisi laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami ketidakstabilan. Akan tetapi kembali meningkat pada bulan Mei hingga Desember. Lalu pada tahun 2013 laju pertumbuhan Dana Pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan, meski pada bulan Juni mengalami penurunan. Akan tetapi kembali naik dan terus meningkat. Hingga Pada tahun 2014 laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan yang pesat pada bulan Januari hingga Desember.

2. Perkembangan IHK di Indonesia

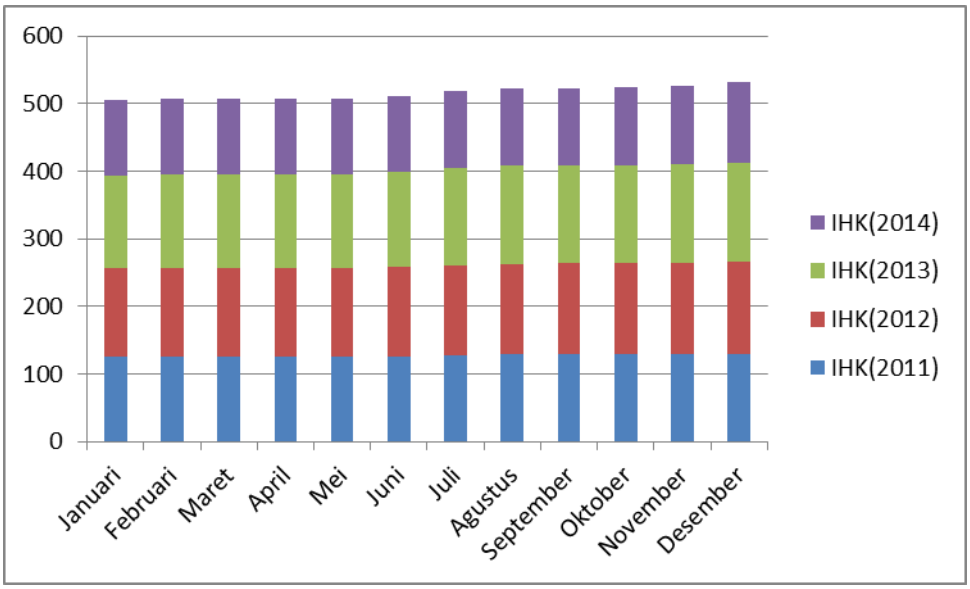

Gambar 4.2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahun 2011 : 1 -2014 : 12 (Persen)

Dari Gambar 4.2. tampak bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2011 hingga 2012 dari bulan Januari hingga bulan Desember kondisinya stabil. Kemudian pada tahun 2013 dari bulan Januari hingga bulan Desember kondisinya konstan. Akan tetapi mulai naik pada bulan Mei hingga Agustus. Meski pada bulan September hingga Oktober kembali konstan, namun pada bulan November hingga Desember kembali naik. Lalu pada tahun 2014 dari bulan Januari hingga Februari kondisinya mulai naik. Akan tetapi kondisinya konstan pada bulan Februari hingga Maret. Meski pada bulan April hingga Agustus kembali naik secara pesat. Namun pada

bulan September hingga oktober kondisinya kembali konstan dan pada bulan November hingga Desember kembali meningkat.

3. Perkembangan Kurs di Indonesia

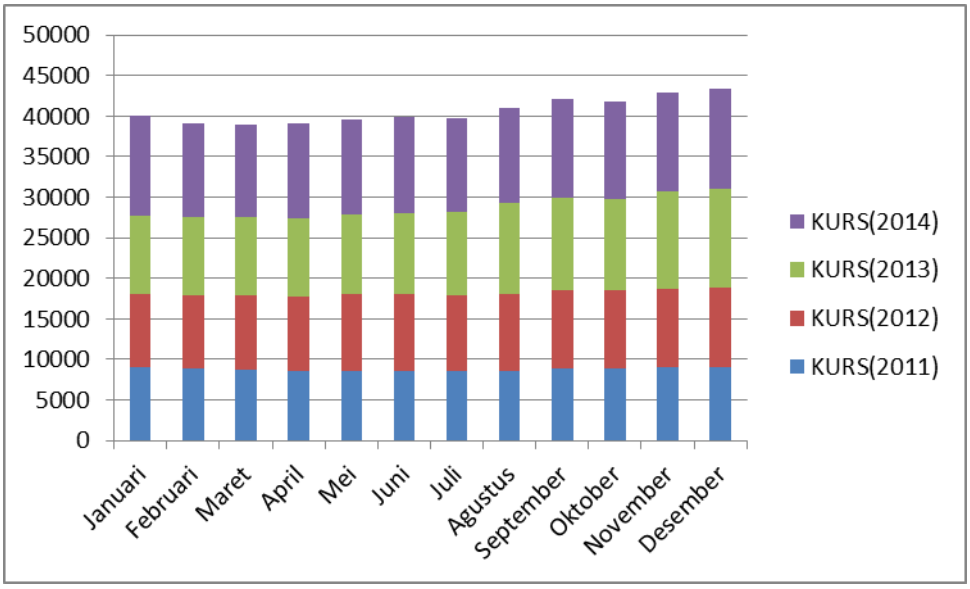

Gambar 4.3. Kurs Tahun 2011: 1-2014:12 (Rupiah)

Gambar 4.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dari bulan januari hingga Mei kondisi kurs terlihat menurun. Akan tetapi pada bulan Juni hingga Desember mulai meningkat. Namun pada tahun 2012 pada bulan Januari hingga April kondisinya stabil. Lalu tidak stabil pada bulan Mei hingga Desember yang cenderung naik dan turun. Kemudian pada tahun 2013 kondisi kurs dari bulan Januari hingga Desember meningkat,itu artinya kondisi Rupiah melemah dan pada tahun 2014 dari bulan januari hingga Desember meningkat pesat.

4. Perkembangan PDB di Indonesia

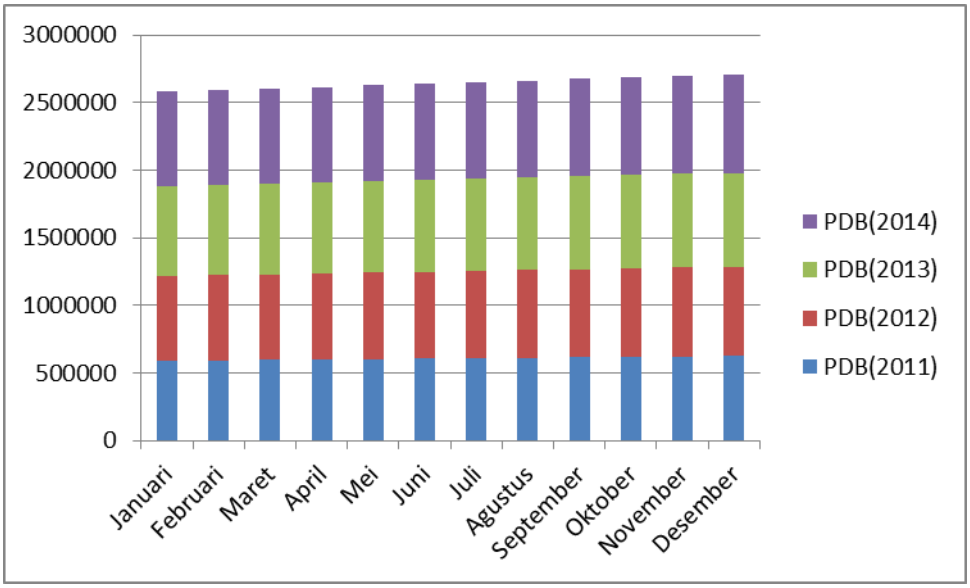

Gambar 4.4. Produk Domestik Bruto Tahun 2011 : 1-2014 : 12

Pada Gambar 4.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terlihat kondisi Produk Domestik Bruto dari bulan Januari hingga Desember konstan. Namun pada tahun 2012 masih terbilang sama yaitu konstan pada bulan Januari hingga Desember. Lalu pada tahun 2013 kondisi Produk Domestik Bruto meningkat pesat dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian pada tahun 2014 meningkat pesat juga dari bulan Januari hingga Desember.